

Masih Perlu Lagi Belajar Mencintai Rakyat

Hal yang sangat mengejutkan, di Sape, Bima telah terjadi bentrok antara polisi dan masyarakat yang lagi unjuk rasa. Menurut informasi, bentrok itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Kejadian ini tentu sangat menyedihkan. Polisi yang semestinya menjaga keamanan dan ketenteraman rakyat, yang terjadi justru sebaliknya.

Awalnya, konflik itu bukan antara polisi dan rakyat, melainkan antara rakyat dengan pengusaha pertambangan. Masyarakat tidak menyetujui eksploitasi pertambangan itu, mungkin disebabkan, karena mereka tidak mendapatkan keuntungan, sementara sebagai penduduk asli merasa berhak. Eksploitasi tambang, menurut berita yang berkembang, dinilai merugikan rakyat, misalnya sumber air terganggu, dan sebaliknya hanya menguntungkan pemilik modal.

Peristiwa-peristiwa serupa sebenarnya juga terjadi di daerah lain, seperti akhir-akhir ini mencuat kaus di Mesuji, Lampung. Lagi-lagi juga terjadi bentrok antara rakyat dan pengusaha perkebunan yang telah mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat. Dukungan itu setidaknya berupa surat ijin yang dikeluarkan. Demikian pula, hal itu yang terjadi di Sape, Bima itu.

Kejadian yang melahirkan protes tidak saja di dua tempat itu. Beberapa hari terakhir ini juga dapat disaksikan melalui siaran TV, kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari Jambi di Jakarta. Mereka menginap di pintu masuk gedung DPR, hingga sudah beberapa hari. Menurut berita itu, pemicu kasusnya serupa, yaitu lahan pertaniannya dicaplok oleh perusahaan perkebunan di sana.

Dalam soal konflik antara rakyat dan perusahaan, yang selalu terjadi, adalah rakyat yang dikalahkan. Mereka selalu berada pada posisi yang lemah. Tatkala ada sesuatu yang merugikan, rakyat protes atau berjuang hanya dengan senjata unjuk rasa. Sementara perusahaan berkoalisi dengan penguasa dan bahkan juga alat keamanan. Dalam konflik itu, rakyat tidak memiliki uang, dan tidak sebagaimana pengusaha, memiliki dukungan kuat, dan memanfaatkannya semaksimal mungkin.

Polisi dalam mengamankan unjuk rasa itu seharusnya tidak boleh berpihak, sekalipun misalnya didanai olehnya. Polisi harus berada pada wilayah netral. Tugasnya adalah mengamankan, agar tidak terjadi pihak-pihak yang dirugikan. Apalagi, peran polisi yang ideal adalah sebagai pengayom dan penjaga keamanan rakyat, dan bukan sebaliknya. Ternyata, polisi seolah-olah kehabisan akal, menggunakan senjatanya.

Begitu pula pejabat setempat, mereka itu adalah pemimpin rakyat. Mereka diangkat dan digaji dari uang rakyat. Oleh karena itu, mereka harus berada di pihak rakyat. Tatkala rakyat menolak eksploitasi pertambangan di tempat itu, dan atau konflik dengan pengusaha perkebunan disebabkan tanahnya diserobot, maka pejabat dan polisi harus berada di pihak rakyat. Mereka harus menjadi pelindung rakyat dari siapapun yang akan menjadikan mereka terugikan.

Umpama pikiran sederhana seperti ini dijadikan pegangan, maka rakyat akan mencintai polisi, dan juga pemerintah setempat. Namun sebaliknya, jika kepentingan rakyat diabaikan, maka mereka hanya bisa berunjuk rasa. Senjata mereka hanya itu. Kepentingan rakyat juga tidak terlalu besar, hanya sekedar agar terpenuhi kebutuhan hidupnya yang sederhana.

Memang tidak menutup kemungkinan, bahwa dalam konflik itu terdapat orang-orang yang disebut sebagai profokator. Biasanya pihak-pihak seperti itu yang disalahkan. Akan tetapi, melihat rakyat yang tidak berdaya, dan selalu dikalahkan oleh kekuatan uang atau pemilik modal, maka siapapun akan membelanya. Orang yang memiliki nurani tidak akan tega, melihat rakyat menderita berkepanjangan di tengah-tengah melimpahnya keuntungan, yang sebenarnya rakyat berhak ikut menikmatinya`.

Menyaksikan siaran televisi apa yang terjadi di Mesuji, Lampung, bahwa rumah rakyat dirobohkan, lalu kemudian mereka membuat gubung atau tenda-tenda di lahan terbuka, kiranya siapapun tidak akan tahan membayangkan penderitaan rakyat itu. Belum lagi, mereka harus melawan kekuatan yang bersenjata dan tentu didukung oleh dana yang kuat. Demikian pula, apa yang tampak melalui televisi di Sape, Bima. Para polisi dengan senjata, mengejar-ngejar demonstran, yakni rakyat yang memprotes perusahaan pertambangan itu.

Di kala rakyat masih menderita seperti ini, sehari-hari masih kesulitan mencari lapangan kerja di negerinya sendiri, dan kadang harus pergi ke luar negeri, menjadi buruh kasar, TKI atau TKW, maka terjadinya peristiwa itu sangat menyedihkan. Bekerja di luar negeri, mereka diperlakukan kasar oleh majikannya, sementara peluang di tempat tinggalnya sendiri dirampas oleh orang lain. Rakyat kecil seperti itu, di mana saja akan merasakan penderitaan yang amat sangat. Sebagai pemimpin, -----entah pejabat, polisi, politikus atau apa saja, harus belajar mencintai rakyat, agar kasus-kasus seperti itu tidak terjadi di mana-mana, di negeri ini.
Wallahu a'lam.